

PERANAN AKUNTANSI DALAM MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DITINJAU DARI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN TEKNOLOGI

Oleh : Eddy Iskandar

Abstrak

Jika keadaan pembangunan dan pemulihan ekonomi Indonesia dikaitkan dengan akuntansi, maka banyak yang bisa dilakukan oleh para akuntan melalui jasanya untuk membantu mempercepat proses pembangunan dan pemulihan ekonomi negara kita ini. Peranan informasi akuntansi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik sangatlah menolong dalam menentukan dan mencari jalan keluar dimasa sulit seperti sekarang ini. Dari data akuntansi dapatlah diidentifikasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi, serta bisa membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk keberhasilan pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila akuntabilitas, trans-paransi, dan teknologi dilaksanakan dengan berkesinambungan. Dalam informasi yang dihasilkan dari akuntansi terdapat indikator keberhasilan pembangunan tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, penggunaan teknologi yang tepat guna. Ini berarti, akuntansi dapat berperan sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara.

Kata kunci : peranan akuntansi, indikator pembangunan ekonomi, akuntabilitas, transparansi, teknologi akuntansi

Pendahuluan

Sejak bulan Juni 1997, negara kita dilanda suatu krisis ekonomi yang sangat dahsyat, yang disebabkan oleh adanya penarikan dana sebesar-besarnya yang mengakibatkan terkurasnya devisa yang disertai melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing, tingginya tingkat inflasi dan suku bunga deposito di bank, sehingga hampir seluruh bank mengalami *negative spread* yang membuat banyak bank mengalami likuidasi.

Selain itu, banyak produsen gulung tikar karena produk mereka tidak mendapat respon dari masyarakat sehingga menimbulkan banyak kerugian.

Hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha mencapai keberhasilan pembangunan dengan memulihkan ekonomi Indonesia. Jika keadaan pembangunan dan pemulihan ekonomi Indonesia ini dikaitkan dengan akuntansi, maka banyak yang bisa dilakukan oleh para akuntan melalui jasanya untuk membantu mempercepat proses pembangunan dan pemulihan ekonomi negara kita ini. Peranan informasi akuntansi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik sangatlah menolong dalam menentukan dan mencari jalan keluar dimasa sulit seperti sekarang ini.

Dari data akuntansi dapatlah diidentifikasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi, serta bisa membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk keberhasilan pembangunan.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila akuntabilitas, transparansi, dan teknologi dilaksanakan dengan berkesinambungan.

Informasi yang dihasilkan dari akuntansi terdapat indikator keberhasilan pembangunan tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, penggunaan teknologi

yang tepat guna. Itulah sebabnya akuntansi dapat berperan sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara.

Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Sofyan Syafri Harahap, 2015)

Menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement No.4*, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif (Sofyan Syafri Harahap, 2015)

Akuntansi juga dapat diartikan sebagai disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian-kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan (R.A. Supriyono, 2016)

Peranan akuntansi

Peranan akuntansi merupakan keterlibatan praktik akuntansi dan semua laporan-laporan yang dihasilkan dalam menjalankan roda pemerintahan disuatu Negara, dengan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi negara yang terkandung didalam akuntansi, yaitu akuntabilitas, transparansi, penggunaan teknologi atau sistem akuntansi yang muktahir dalam praktiknya.

Akuntansi memiliki peran yang luas dalam kegiatan Negara. Peran yang paling utama dari praktik akuntansi adalah pengendali keuangan, akuntansi memiliki data lengkap dan terperinci, yang disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan atas pembangunan ekonomi Negara.

Selain berperan sebagai pengendali keuangan, praktik akuntansi pada sebuah Negara juga memiliki peran operasi, pelaporan, serta perencanaan. Yang semuanya memiliki unsur yang sama dengan indikator atau alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi Negara.

Pengendali Keuangan

Keuangan yang terkendali dengan baik merupakan salah satu faktor keberhasilan sebuah aktifitas baik pada perseorangan, perusahaan, bahkan Negara sekalipun.

Dengan adanya pengendalian keuangan, Negara dapat memilih mana aktifitas keuangan yang layak untuk dilaksanakan, mana yang perlu dipertimbangkan atau direvisi kembali, mana yang harus diberhentikan atau ditolak, dan mana yang harus tetap dipantau secara konsisten. Sehingga resiko kerugian secara ekonomi dan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi juga dapat diminimalisir.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sebuah sistem akuntansi yang baik, akan membantu kita mengidentifikasi area permasalahan dan berfungsi sebagai alat pengendali keuangan yang dibutuhkan.

Operasi

Akuntansi dalam praktiknya memiliki hubungan yang paling dekat terhadap setiap aktifitas keuangan yang dilakukan dalam sebuah Negara.

Hal ini dikarenakan akuntansi merupakan aktifitas mencatat semua operasi keuangan yang terjadi pada seluruh aspek pemerintahan. Mulai dari hal terkecil sekalipun, semuanya dicatat dengan lengkap, terperinci dan disertai dengan bukti-bukti transaksinya.

Pelaporan

Dalam lingkup perorangan maupun perusahaan, orang-orang yang terlibat didalamnya dapat melihat status bisnisnya secara periodik melalui laporan-laporan yang disediakan oleh akuntansi.

Akuntansi juga menyediakan laporan-laporan yang menunjukkan bagaimana status sebuah Negara, melalui aktifitas pemerintahannya.

Nilai ekonomi dari setiap kegiatan pemerintah akan tampak pada laporan yang disediakan akuntansi secara periodik maupun secara akumulasi.

Perencanaan

Perencanaan dapat dipahami sebagai proses untuk menggambar masa depan. Dalam proses perencanaan ditetapkan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang, yang disertai dengan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Termasuk tujuan ekonomi.

Akuntansi berperan dalam perencanaan ekonomi Negara, melalui data-data atau laporan-laporan yang disediakan, dan dapat dibandingkan pergerakan ekonominya dari periode yang satu ke periode lainnya. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan dalam rangka pembangunan ekonomi Negara.

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut Prof. Meier dan Baldwin, pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses itu pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang (Safril, 2003).

Pengertian lain pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Irawan, 1992).

Sedikit berbeda menurut Robert E. Baldwin, Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara (Robert E. Baldwin, 2008)

Dari definisi pembangunan ekonomi tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, seperti hubungan timbal balik, yaitu pembangunan ekonomi Negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi Negara.

Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability*. Pengertian dari akuntabilitas adalah memper-tanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic (KK, SAP, 2005)

Pengertian Transparansi

Pengertian transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2005)

Pengertian Teknologi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia versi *online*, pengertian teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan.

Sebagai teknologi, akuntansi dapat memanfaatkan teori-teori dan pengetahuan yang dikembangkan dalam disiplin ilmu yang lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa harus mengembangkan teori tersendiri.

Akuntansi yang ditinjau dari sisi teknologi adalah akuntansi yang memang dirancang untuk memperlancar kegiatan ekonomik, juga bermanfaat untuk kepentingan (kebijakan) politik.

Akuntansi secara teknologi berupa sebuah sistem yang dibangun untuk mendukung program kerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi Negara.

Sistem akuntansi yang dimaksud biasanya berupa perangkat lunak (*software*) atau berbagai aplikasi yang dapat diterapkan untuk menghasilkan laporan-laporan ekonomi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hal pembangunan ekonomi Negara. Sistem ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang telah ahli dalam menggunakannya.

Hasil Dan Pembahasan

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelompokkan transaksi-transaksi keuangan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Peran akuntansi dalam pembangunan ekonomi Negara secara global tidak dapat dianggap remeh karena berhubungan dengan kepercayaan publik baik secara nasional maupun secara internasional.

Oleh karena itu akuntansi menjadi suatu profesi yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian.

Peranan akuntansi dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara antara lain adalah berperan sebagai;

Pengendali Biaya

Akuntansi akan menjadi alat pengendali biaya dari aktifitas yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintahan. Pemerintah memiliki banyak divisi yang berbeda-beda dan sangat luas terbentang diseluruh negeri Indonesia.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setiap harinya memerlukan pencatatan atau pembukuan. Biaya yang dikeluarkan dari setiap divisi pun berbeda-beda tergantung pada tingkat kepentingan.

Dari hasil laporan akuntansi, pemerintah dapat menilai mana aktifitas yang perlu ditunda atau dihentikan, mana aktifitas yang harus diteruskan dan sudah tau bagaimana alokasi dana yang diperlukan pada masa lalu, masa kini dan masa depan.

Dengan adanya pengendalian biaya berarti ada tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktifitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya dapat dilakukan melalui anggaran yang secara kontinyu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi relative kecil

Tanggungjawab atas pengendalian biaya harus diserahkan kepada personel yang juga bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Prestasi kerja setiap personel harus diukur dengan membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi dengan biaya yang dianggarkan.

Melalui proses akuntansi, dapat ditemukan apabila terjadi kecurangan maupun penyalahgunaan keuangan Negara oleh oknum-oknum tertentu, apabila ditemukan penyalahgunaan tersebut maka pemerintah dapat menentukan tindakan korektif yang perlu dilakukan, dan apabila perlu pemerintah juga dapat memberi hukuman yang pantas kepada oknum yang dengan sengaja melakukan kecurangan atas keuangan Negara.

Dengan demikian kondisi ekonomi Negara dapat dijaga kestabilannya meskipun sedang berada dalam era globalisasi, dan juga pihak-pihak pengendali biaya bisa meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kondisi ekonomi Negara yang terkendali dapat mendorong pembangunan ekonomi Negara secara menyeluruh. dengan kondisi ekonomi yang terkendali juga dapat menarik minat para investor untuk menanamkan kepercayaannya terhadap Negara.

Operasi

Setiap kegiatan operasional yang dilakukan pasti bernilai ekonomi, akuntansi memproses nilai ekonomi tersebut, mulai dari pengumpulan bukti, pencatatan sampai menjadi sebuah laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Dari laporan akuntansi tersebut, pemerintah dapat menilai apakah aktifitas operasional Negara ini menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Negara, atau malah sebaliknya.

Pihak pemakai laporan akuntansi itu juga dapat mengukur dari operasional pemerintah apakah pembangunan ekonomi Negara sudah meningkat secara signifikan. Karena nilai ekonomi dari aktifitas operasional suatu Negara yang sedang membangun akan berbeda dengan operasional Negara yang masih tertinggal.

Kegiatan pemerintah yang diukur nilai ekonominya dalam laporan akuntansi diharapkan kegiatan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mendukung rencana pembangunan ekonomi Negara.

Laporan ekonomi yang disajikan melalui akuntansi atas kegiatan operasional Negara sering juga disebut akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, yang mana sistemnya dibangun khusus untuk jalannya roda pemerintahan suatu Negara yang bukan mencari laba, tapi lebih ditekankan pada pencatatan, pelaksanaan anggaran Negara serta realisasi penggunaan anggaran dalam kegiatan pemerintahan yang mendukung proses pembangunan ekonomi Negara.

Pelaporan

Akuntansi memiliki output berupa laporan ekonomi secara periodik. Laporan akuntansi ini diselesaikan secara tepat waktu, dengan lengkap dan terperinci, untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas tersebut.

Laporan yang disajikan dalam akuntansi pemerintahan mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam kegiatan pemerintahan dan laporan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintahan yang handal, juga sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui

Perkiraan yang dibuat dalam laporan akuntansi pemerintahan merupakan analisis ekonomi atas data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan nasional.

Laporan akuntansi pemerintahan ini dapat membantu penyusunan APBD dan strategi pembangunan serta pengendalian atas kegiatan yang efisien, efektif dan ekonomis.

Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan.

Akuntansi dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat rencana kedepan. Biasanya data atau laporan akuntansi secara periodik diakumulasikan untuk pembuatan rencana masa yang akan datang. Karena nilai-nilai ekonomi yang ada dalam laporan akuntansi itu dapat menggambarkan keadaan suatu entitas dimasa yang akan datang, demikian halnya dengan Negara.

Dalam aktifitas pemerintahan, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan Negara. Disinilah informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

Informasi akuntansi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, atau semesteran.

Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah disampaikan secara formal atau informal. Mekanisme formalnya misalnya melalui rapat-rapat dinas, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan

informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

Para ahli-ahli ekonomi juga dapat melakukan prediksi dan rencana arah pembangunan ekonomi Negara dengan berdasarkan pada laporan-laporan yang berasal dari akuntansi.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan istilah yang memiliki arti yang sangat luas, namun tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas.

Pembangunan ekonomi Negara juga memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pendapatan riil perkapita jangka panjang, yang disertai dengan adanya perbaikan dalam sistem kelembagaan, pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana isi pembukaan tersebut dimaksudkan bahwa pemegang kekuasaan atau pemerintah serta kedaulatan berada di tangan rakyat.

Indonesia sekarang ini dapat kita lihat dari upaya Bapak Presiden Joko Widodo dalam pembangunan nasional melalui pembenahan sarana, prasarana, infrastruktur dan juga membuat program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sering kita sebut dengan program ekonomi kerakyatan.

Program ekonomi kerakyatan dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan nasional, kesempatan kerja, perekonomian yang stabil, distribusi pendapatan yang merata. Konsep ekonomi kerakyatan merupakan strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ekonomi kerakyatan ini masyarakat membantu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dilain pihak masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk bersaing dengan hasil pelaku usaha Negara-negara lain. Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat dengan kemudahan mendapatkan dana tambahan untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dikalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam proses pembangunan ekonomi Negara, akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tatanan pembangunan dimana akuntansi menjadi sistem pengawasan yang terkait dengan penggunaan dana dan juga realisasi anggaran, sehingga transparansi dalam proses pembangunan dapat diukur dan dicapai.

Peran akuntansi dalam menyediakan informasi harus dijaga independensinya, dan informasinya disampaikan secara lengkap, tidak ada informasi yang disembunyikan dalam ekonomi kerakyatan ini.

Akuntansi sebagai penyedia informasi yang *original* harus memastikan perekonomian Negara berada di level transparansi dan akuntabilitas terbaiknya. Jika diperlukan, akuntan sebagai pihak pengelola akuntansi harus beradaptasi

secara sempurna dengan aspek-aspek masa kini, sehingga perannya tetap optimal dalam sebuah perekonomian.

Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa Akuntansi diharapkan dapat membawa transparansi informasi ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi pengaruh yang sempurna bagi pembangunan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan.

Akuntabilitas

Dalam majalah dwibulanan BPK-RI, Majalah Pemeriksa, No.116/ Edisi Khusus 2008/ Tahun XXVIII, halaman 27, Anwar Nasution (Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan pada saat itu), mengingatkan bahwa upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara merupakan harga yang tidak bisa ditawar lagi. Kelemahan sistem akuntansi dan sistem hokum sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan BPK telah membuat Negara kita menjadi salah satu Negara terkorup di dunia. Banyak kasus yang menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan Negara, tersebarinya rekening-rekening liar yang berjumlah puluhan triliun rupiah, penumpukan anggaran diakhir tahun, pengelolaan minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, pengelolaan pertambangan, serta kasus-kasus bank yang meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi Negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Pemerintah perlu bersungguh-sungguh menjalankan manajemen keuangan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui kerja keras dan komitmen kuat dalam meng-implementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan nilai-nilai ekonomi Negara.

Akuntabilitas publik pada dasarnya merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan.

Dengan kata lain, publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang telah diberi kepercayaan, dan pihak pemerintahan juga harus mampu menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada, pencapaian apa yang dapat dibuktikan, bahkan sampai ke pertanyaan dan penjelasan hal-hal yang bersifat pertanggungjawaban.

Bila pertanggungjawaban itu menyangkut kepentingan publik, maka disebut akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan salah satu sifat akuntansi khususnya akuntansi sektor publik. Sasaran utama dari akuntansi sektor publik adalah memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk dapat menuju dan mencapai serta menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera terlebih dahulu diawali reformasi di pemerintahan dibidang :

1. Reformasi sistem anggaran
2. Reformasi sistem akuntansi
3. Reformasi sistem pemeriksaan
4. Reformasi sistem manajemen keuangan
5. Reformasi sistem kelembagaan (Mardiasmo, 2002)

Reformasi sistem ini menyangkut tentang penyusunan anggaran, pemerataan alokasi anggaran, tentang pencatatan serta pelaporan dalam bentuk pertanggungjawaban yang terbuka dan bebas diketahui oleh masyarakat luas, tentang pemeriksa yang independen, penyampaian laporan hasil pemeriksaan secara cepat, tepat, dan akurat.

Juga menyangkut dengan peran akuntansi sebagai perencana dan pengendali keuangan yang efisien, efektif dan ekonomis.

Kandungan informasi keuangan yang disajikan melalui proses akuntansi yang mengimplementasikan akuntabilitas didalamnya, dapat menunjukkan kinerja yang telah dicapai pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi Negara.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh perwakilan rakyat dan masyarakat secara umum.

Transparansi berhubungan erat dengan akuntabilitas. Transparansi pengelolaan keuangan Negara pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi sendiri bisa dikatakan sebagai instrument yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Keterbukaan yang diawali dari kesiapan organisasi untuk melaksanakan suatu amanah, merencanakan, melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sampai pelaporan sangat efektif untuk terwujudnya organisasi yang bebas korupsi dan akuntabel.

Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Prinsip transparansi pada pemerintahan dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut: (Agus Dwiyanto, 2006)

1. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebuah pemerintahan dikatakan terbuka (transparan) apabila memenuhi empat unsur utama seperti di bawah ini : (Agus Dwiyanto, 2006)

1. Pemerintahan menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Berbagai informasi itu antara lain, kebijakan pemerintah dan pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut, peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan itu serta biaya dan dampak yang mungkin terjadi.
2. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).

3. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi-komisi, maupun notulen hasil rapat.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.

Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, transparansi disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Transparansi jelas dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki oleh pemerintah, kini dengan adanya transparansi dapat diakses juga oleh berbagai komponen masyarakat.

Untuk mewujudkan transparansi yang seperti ini diperlukan dukungan teknologi, dan informasi yang disajikan juga bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Dengan adanya transparansi pada pemerintahan, masyarakat dapat memahami dan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya yang terkait pada transparansi laporan-laporan akuntansi yang berisi penggunaan keuangan Negara yang bertujuan untuk pembangunan Negara.

Teknologi

Pada masa krisis ekonomi pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian kembali pada posisi awal dan salah satunya melalui teknologi yang mempengaruhi proses pembangunan dan pendapatan Negara.

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor teknologi. Faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (tenaga kerja), akumulasi modal serta tenaga manajerial yang mengorganisasi dan mengatur faktor produksi. Bagi kebanyakan ahli ekonomi, kemajuan teknologi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Jurang perbedaan tingkat teknologi antara negara berkembang dan negara maju cenderung semakin besar. Perbedaan tingkat teknologi tersebut dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan.

Teknologi informasi kini tidak ubahnya seperti asisten yang handal, yang dapat melakukan banyak hal di seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi.

Pemerintahan yang menerapkan sistem teknologi dalam pengelolaan ekonomi Negara juga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dan kesalahan yang fatal atas penggunaan keuangan serta nilai-nilai ekonomi suatu Negara.

Adapun teknologi yang diterapkan pemerintah seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat *e-government* yang dapat dirasakan antara lain :

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum
Penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan dapat membuat masyarakat dapat berinteraksi dengan cepat dan langsung.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, *passing grade*, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara *online* dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien
Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bahkan *video conference*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan kesemuanya tanpa harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi *online* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang ber-hubungan dengan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Dengan menggunakan teknologi internet, maka pemerintah dapat mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui setiap penyampaian informasi yang bersifat formal. Contohnya adalah rapat-rapat di pemerintahan yang dapat disaksikan melalui akun media sosial milik pemerintahan itu sendiri. Meskipun tidak seluruhnya dapat diakses secara publik karena ada juga rapat-rapat pemerintahan yang tidak boleh disiarkan ke publik, tapi dari sini dapat diukur apakah sektor pemerintahan sudah menjalankan rencana-rencana dan program-program pembangunan, melalui akses bebas ini, masyarakat juga dapat menilai kinerja pejabat-pejabat yang telah dipercayakan dalam pengelolaan ekonomi Negara.

Demikian halnya pada akuntansi sekarang ini, sudah banyak tersedia penerapan teknologi pada proses akuntansi baik pada perusahaan, organisasi juga pada pemerintahan.

Teknologi yang diterapkan dalam akuntansi ini membantu proses pengerjaan akuntansi sesuai dengan prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi), SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat), SABUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara) yang dipakai pada sektor pemerintahan.

Aplikasi ini tidak hanya membantu mengefisienkan tugas para akuntan untuk membukukan transaksi-transaksi saja, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Negara. (Modul Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, 2014, No.11 tentang penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Penerapan teknologi dalam akuntansi ini juga bisa menghubungkan akuntansi dengan bagian lainnya, baik itu bagian yang memakai laporan akuntansi secara langsung ataupun yang tidak langsung. Dan biasanya dihubungkan dengan internet. Salah satu contohnya adalah *e-budgeting*.

e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis *web* untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) Pemerintah.

Transparansi Anggaran melalui *e-budgeting* merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara *online* dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat.

Dengan adanya *e-budgeting*, mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah baik di daerah ataupun di pusat menjadi lebih mudah, sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat.

Teknologi yang ada sekarang ini sangat membantu proses akuntabilitas dan transparansi laporan-laporan akuntansi yang berkaitan dengan penggunaan, pengawasan serta perencanaan ekonomi Negara.

Kesimpulan

Akuntansi yang terintegrasi dengan teknologi, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menuju pembangunan ekonomi Negara yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Akuntabilitas, transparansi dan teknologi yang diterapkan dalam akuntansi merupakan hal yang menjadi perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi Negara. Karena bisa membuka wawasan masyarakat terhadap keadaan ekonomi sekarang ini, dan masyarakat juga semakin memahami dan dapat mendukung jalannya program-program dan rencana kerja pemerintah untuk membangun perekonomian Negara.

Akuntansi yang berperan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi Negara memiliki bagian yang jelas dalam laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan diterapkan sesuai dengan teknologi yang tepat guna,

dapat menunjukkan sejauh mana pembangunan ekonomi Negara telah dilaksanakan, dan melalui laporan-laporan yang dihasilkan oleh akuntansi, pemerintah juga dapat meninjau kembali serta merencanakan kembali program-program terbaiknya untuk pembangunan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance melayani public*. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Baldwin, Robert E. 2008. *Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Irawan, Suparmoko. 1992. *Ekonomika pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Majalah dwi bulanan BPK-RI, *Majalah Pemeriksa No.116/edisi khusus 2008/tahun XXVIII, hal. 16 dan hal. 27*
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. 2002. Yogyakarta : Andy. Hal. 19-20
- _____, Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005, tentang Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (KK-SAP)
- R.A. Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*. 2016. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Safri, dkk. *Ekonomi dan pembangunan*. 2003. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sofyan Syafri Harahap. *Teori akuntansi edisi revisi*. Cetakan ke-14. 2015. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suwardjono. *Teori akuntansi – Perencanaan pelaporan keuangan*. Edisi ke-3, cetakan ke-8. 2014. Yogyakarta : BPFE
- <https://kbbi.web.id/>